

IMPLEMENTASI ARSITEKTUR TAMADUN DALAM KONSEP PENGEMBANGAN SUATU KAWASAN

Ramayana, Melly Andriana

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Sumatera Utara Indonesia.

Abstrak

Makalah ini mencoba menjajaki kemungkinan untuk membangun suatu Sistem Teori Arsitektur tamadun melalui tinjauan tentang definisi teori dan Teori Arsitektur tamadun sebagai body of Knowledge, identifikasi sistem dan sumber Teori Arsitektur, Pilihan ragam teori dan lingkup problematisasi yang tepat bagi Teori Arsitektur tamadun, dan pembukaan ranah teorisasi baru serta penentuan strategi pembangunan dan pengembangan Sistem Teori Arsitektur tamadun. Hal ini sama seperti yang telah dilakukan oleh Iwan Sudrajat (1999) yang dipaparkannya melalui Ngawangun Ki Nusantara. Konsep perencanaan dan pengembangan kota di Indonesia selama ini masih bersumber kepada suatu konsep yang dibangun berdasarkan landasan teori yang berkembang dari Teori Barat sehingga pengaruh tersebut dapat menyebabkan Arsitektur tamadun terutama pada alam atau lingkup perkotaan akan kehilangan jati diri. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para ahli perkotaan selalu berlandaskan atas pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang ada pada kota-kota di belahan dunia lain. Melihat keadaan Indonesia saat ini dimana alam demokrasi telah dibuka lebar-lebar maka tanpa disadari bahwa bangsa kita telah memasuki masa yang hampir merupakan suatu masa tanpa batas dan menghalalkan segala perbedaan. Hal ini membuka peluang bahwa konsep perencanaan dan pengembangan kota di Indonesia memiliki suatu kebebasan akan beracuan kepada teori apapun. Disinilah peluang kita membangun suatu konsep perencanaan dan pengembangan kota yang lebih dilandasi oleh kekuatan-kekuatan yang dapat dibangun dari pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari teori-teori Arsitektur tamadun.

Kata-Kata Kunci : *Teori Arsitektur Tamadun, Konsep Pengembangan Kota*

I. PENDAHULUAN.

Teori tentang bentuk arsitektur di Nusantara secara sporadis telah dibahas dalam berbagai perspektif keilmuan seperti arkeologi, sejarah seni dan arsitektur, tetapi Teori Arsitektur tamadun sebagai bidang studi yang terpadu, sistematis, dan kritis masih merupakan angan-angan yang jauh dari kenyataan (Laurens, 2004).

Kerinduan akan Sistem Teori Arsitektur tamadun lahir dari kemandulan visi dan prestasi, serta ketidak-mampuan para intelektual di Indonesia untuk memahami keragaman fenomena arsitektural yang telah, sedang dan akan terjadi dalam konteks kehidupan bangsa yang sangat majemuk dan sarat dengan paradoks (Kaur, 2016). Lebih buruk lagi, di lubuk hatinya yang paling dalam para intelektual sangat berharap bahwa Sistem Teori Arsitektur tamadun secara langsung akan turut membantu memecahkan krisis multidimensional yang sedang dihadapi dunia arsitektur dan kehidupan masyarakat pada umumnya di bumi Nusantara. Suatu ke-naif-an yang romantis, seperti skenario film stereotip Bollywood (Lestari & Alamsyah, 2019).

Bila kita mengkaitkan hal diatas degan perkembangan kota khususnya di wilayah Nusantara, kerinduan akan Sistem Teori terutama Teori Perkotaan juga dirasakan dan sangat dibutuhkan, karena secara umum perkembangan kota di wilayah Nusantara dan khususnya di Indonesia berorientasi pada perkembangan kota-kota di dunia (MENTERI et al., 2015). Hal ini dapat dilihat pada kenyataan kota saat ini bahwa kota-kota di Indonesia sudah berkembang jauh dan lanjut dibandingkan dengan konsep kota saat pertama kali muncul. Dunia pertama kali mengenal kota mungkin ketika *Raja Urnamu* membangun ibukota bagi kerajaan yang saat itu paling maju yaitu Mesopotamia, sekitar lima milenium yang lalu. Kata *urban* sebenarnya diturunkan dari nama ibu-kota *URNAMU* tersebut (Hunggurami, 2017).

Dalam perjalanan sejarah, kota mengentalkan fungsinya sebagai pusat peradaban, pusat budaya, pusat pengambilan keputusan, akumulasi kegiatan ekonomi (barang dan jasa) dan tempat konsentrasi beragam manusia, wadah berseminya nilai-nilai kehidupan bangsa yang tinggi yang merupakan jendela budaya bangsa dan sebagainya. Kota kini selain berfungsi untuk kehidupan dan penghidupan dari warganya

juga harus mampu mendukung kepentingan fungsi global dan regional dan saling tergantung dengan kota lain, serta melayani wilayah sekitarnya (Taufik, 2013).

Definisi kota yang mengikuti pemikiran *Max Weber* masih perlu diperhatikan yaitu kota adalah wadah penyelenggaraan kegiatan politik untuk merangsang perkembangan ekonomi, sosial, lingkungan, budaya dan peradaban (Suryaputra P. et al., 2014).

Aspek ini kini perlu lebih ditonjolkan sebagai modal memasuki milenium berikutnya. Politik kota yang ada saat ini lebih banyak dilaksanakan demi menjaga eksistensi dari fihak yang sedang berkuasa. Konotasi faham *Weber* adalah bahwa hasil politik kota harus diukur dari peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya; ini sejauh ini belum diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui tokoh-tokohnya. Masih banyak definisi kota menjelang pergantian abad yang dikemukakan oleh berbagai fihak, baik yang bersifat teknis seperti makin majemuk sifat fungsi kota, informasionalisasi hingga kota sebagai pengemban budaya dan peradaban bangsa serta persaudaraan dunia yang makin menyatu dan utuh (*united*). Hal ini akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan masalah dan kesempatan yang ada serta akan ada di kemudian hari. Hal diatas dapat memberikan gambaran bahwa perkembangan kota-kota di Indonesia masih sangat bergantung pada jalannya perkembangan kota-kota di seluruh dunia (Nurillah, 2014).

II. METODA MEMBANGUN SUATU TEORI

“Teori” memang sulit dirumuskan dalam definisi yang baku, tetapi dapat dijelaskan melalui karakteristik. Menurut (Halim & Abdullah, 2006) “Teori” seringkali diartikan sebagai seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena, peristiwa dan situasi melalui uraian tentang hubungan di antara variabelnya, guna menjelaskan dan memprediksi fenomena, peristiwa dan situasi tersebut. Selanjutnya manfaat teori dibuktikan melalui kemampuannya dalam hal ; pengorganisasian gagasan pemikiran; proses generalisasi (berfikir induktif); proses inferensi (berfikir deduktif); pembatasan lingkup studi melalui inklusi dan eksklusi dan pemeriksaan in-otentisitas dalam data.

Menurut Stephen P. Borgatti, teori yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *Mechanism or Proses*

Teori yang baik memiliki elemen dinamis yang memberikan pemahaman tentang proses, mengapa suatu situasi atau kondisi beralih ke situasi atau kondisi lain.

2. *Generality*

Teori yang baik bersifat umum sehingga dapat diterapkan pada lingkup situasi atau kondisi yang lebih luas.

3. *Truth*

Pada hakekatnya teori tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena dua alasan diantaranya yang pertama ada yang dinamakan pengujian terakhir, karena kesempatan pengujian sebenarnya tidak terbatas, dan setiap hasil pengujian berikutnya mungkin saja membuahkan hasil yang berbeda dengan pengujian sebelumnya, yang kedua teori hanyalah deskripsi tentang fakta, dan dalam kenyataan suatu fakta tidak hanya dapat dijelaskan oleh teori, tetapi oleh beberp alternatif teori yng memiliki validitasi sama. Karena itu, keberlakuan suatu teori selalu bersifat terbatas, relatif dan sementara.

4. *Falsifiability*

Teori yang baik dapat dibuktikan keberlakuannya melalui eksperimen atau pengumpulan data

5. *Parsimony*

Teori yang baik mempunyai rumusan keterkaitan yang jelas dan sederhana. Teori seringkali disebut sebagai model, di mana seluruh gagasan yang terkandung di dalamnya dikemas secara sederhana dengan cara menanggalkan hal-hal yang dianggap tidak penting.

6. *Fertility*

Teori yang baik mampu membangkitkan banyak implikasi pada berbagai bidang, sehingga dapat melahirkan pengetahuan baru atau cara pengujian teori yang baru.

7. *Surprise*

Teori yang baik harus menarik dan membawa cara pemahaman baru, sehingga dapat menghasilkan prediksi yang tak terduga dan menyenangkan.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik suatu penjelasan tentang “*theorizing process*”. Proses teorisasi (*theorizing process*) adalah proses iteratif *kreasi – kritik – re-kreasi* untuk menghasilkan teori yang baik, yang didirikan oleh ketujuh kriteria tersebut diatas. Proses teorisasi yang sempurna tidak hanya menghasilkan teori yang baik, tetapi juga indah. Proses untuk menghasilkan keindahan tersebut menuntut kepekaan dan naluri seni tersendiri.

Apabila teori arsitektur dipahami sebagai seperangkat gagasan yang bermaksud menjelaskan atau menafsirkan berbagai

fenomena arsitektural, maka secara umum kita dapat membedakan 4 (empat) jenis teori arsitektur, yakni :

1. Teori Sosial Ilmiah (*Social Scientific Theory*)

Teori Sosial Ilmiah umumnya berupa pernyataan-pernyataan (statements) tentang sifat, fungsi dan pengaruh arsitektur dalam rona kemasyarakatan dan nilai sosial budaya tertentu, yang diturunkan secara sistematis dari pengamatan obyektif dan bukti-bukti empiris, dan seringkali berkaitan erat dengan teori sosial ilmiah dari disiplin keilmuan yang lain, seperti: antropologi, arkeologi, sosiologi, sastra, dan lainnya.

2. Teori Normatif (*Normative Theory*)

Teori Normatif mempertanyakan tentang bagaimana seharusnya arsitektur berperan dalam rona kemasyarakatan serta nilai sosial budaya tertentu, sehingga pada gilirannya akan mampu mempengaruhi kepekaan apresiasi, evaluasi dan antisipasi terhadap fenomena arsitektur di masa lampau, masa kini dan masa mendatang.

3. Teori Kerja (*Working Theory*)

Teori kerja sekaligus bersifat praktis dan normatif, berfungsi sebagai pedoman untuk memandu cara kerja mereka yang terlibat dalam proses produksi arsitektur, agar sejalan dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dan tujuan ideal yang ingin dicapai. Teori kerja bisa dituangkan dalam bentuk tradisi, praktek profesional, norma, rules of thumb, metoda dan teknik.

4. Teori Akal Sehat (*Commonsense Theory*)

Teori Akal Sehat merujuk pada pemikiran dan gagasan subyektif yang diturunkan dari pengalaman individu, terutama para arsitek, dosen, kritikus dan sejarawan. Teori Akal Sehat umumnya tidak diartikulasikan, tetapi secara implisit mendasari berbagai pandangan, penilaian dan tindakan aktor yang bersangkutan.

Meskipun ke empat jenis teori arsitektur tersebut di atas merupakan sumber yang penting dalam kerangka pemahaman fenomena arsitektur, tetapi untuk tujuan kajian yang bersifat ilmiah, teori pertama dan kedua memiliki nilai lebih dibanding yang ketiga dan keempat.

III. REALITA PENGARUH ARSITEKTUR TAMADUN DALAM KEHIDUPAN KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA

Bagaimana realitas Arsitektur di Indonesia?. Pada posisi perkembangan masyarakat yang manakah arsitektur Indonesia

berada?. Realita sosial arsitektur Indonesia tidak bisa lepas dari konteks pembangunan masyarakat industrial baru. Struktur sosial budaya yang membentuk nilai dan batasan-batasan perancangan arsitekturalnya masih samar. Kesamaran ini berkait erat dengan proses modernisasi sikap hidup, disatu pihak, dan pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung tetapi terpusat di sentra-sentra, di lain pihak. Sementara itu ketimpangan sosial maupun pendapatan terus menerus melebar karena struktur pemerataannya belum sempat terbangun; pembangunan institusional lebih lambat daripada pembangunan fisik-arsitekturalnya. Realitas sosial yang mendukung nilai arsitektural Nusantara adalah fragmen-fragmen yang tidak mudah dikaitkan satu sama lain secara arsitektural. Arsitektur di negeri tercinta ini menawarkan semua kemungkinan yang selalu bersumber dari budaya lokal dan lingkungan fisik lokal. Ini saja sudah menggambarkan dengan jelas bahwa sebenarnya realita sosial yang ada di negeri tercinta ini bahwa segala sesuatunya baik kehidupan ekonomi, sosial-budaya bahkan yang lebih spesifik lagi adalah arsitektur, tidak dapat dipersatukan dari sekian banyak keragaman, yang paling baik sebenarnya dapat dilakukan adalah membiarkan keberagaman tersebut berjalan apa adanya di dalam suatu persatuan (yang hanya berorientasi pada persatuan di bidang politik atau pemerintahan).

Pelaksanaan dari arsitektur itu sendiri pada negeri ini ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Kenyataannya bahwa arsitektur di negeri ini lebih didominasi oleh pengaruh-pengaruh dari luar terutama yang berorientasi kepada arsitektur-arsitektur yang dibawa dari negeri Eropa maupun Amerika. Arsitektur regional tersisih berdasarkan keadaan, dimana arsitektur regional untuk sementara ini dianggap tidak mampu bersaing dengan arsitektur yang berasal dari luar tersebut. Bila kita bicara mengenai arsitektur tentu kita akan membicarakan produk dari arsitektur itu sendiri yaitu bangunan. Bangunan-bangunan yang ada di Indonesia pada umumnya lebih memilih berorientasi pada dunia luar, bukan pada kemampuan regionalnya. Sebagai bukti dapat kita dilihat, bangunan-bangunan yang berada pada kota-kota besar di Indonesia antara lain Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan mungkin juga di Makassar. Untuk kota Denpasar Bali untuk sementara di dalam permasalahan ini dianggap masih mampu menampilkan ciri khas regionalnya untuk bersaing dengan arsitektur-arsitektur pendatang tersebut.

Kedudukan arsitektur bisa dilihat sebagai komoditi oleh kelompok masyarakat tertentu, yang berkecimpung aktif dalam pembangunan ekonomi. Arsitektur seperti itu bisa dilihat pula sebagai hasil *fancy* atau *Minderwertigkeits-Komplex* negara berkembang karena takut disebut terkebelakang. Apa sebenarnya masalah dasar arsitektur di Indonesia ini?. Apakah pembangunan masyarakat industrial ini menjadi struktur dasar pembentuk nilai arsitektur di Indonesia, dengan catatan bahwa pembentuk nilai dasar ini tidak mengabaikan konteks budaya regional beserta *toposnya*?

Kecenderungan yang kuat pada arsitektur di Indonesia bertumpu pada *figurativism* atau *graphism*, seperti yang muncul pada Gedung Delta di Surabaya, Gedung Universitas Atmajaya Jakarta atau gedung-gedung lainnya di Jalan Kuningan Jakarta. Elitisme menjadi bagian ideologis kecenderungan arsitektur demikian, sekalipun tanpa program yang mampu membicarakan kultur Indonesia dalam pembangunan. Universalitas yang dipropagandakan oleh pelopor arsitektur modern kontinental Eropa tahun 1920-1930-an terdengar echo-nya pada arsitektur di Indonesia. Artinya yang disebut sebagai sebuah dunia tersendiri arsitektur di negeri tercinta ini dilihat oleh sementara arsitek sebagai gerakan internasional; ironisnya, sumber dari arsitektur ini didominasi oleh arsitektur Michael Graves.

Permasalahan arsitektur ini berhadapan dengan kekuatan hedonisme kalangan masyarakat elit, termasuk para teknokrat dan pengusaha. Kekuatan keduanya merupakan bagian yang tak dapat dikendalikan secara arsitektural yang bertumpu pada kultur modernisme. Arsitektur yang akan dilahirkan oleh aliansi kekuatan para pengusaha dan teknokrat serta birokrat ini lebih beranjak pada komoditi dan *corporate identity*; arsitektur sebagai bagian terpadu promosi dagang yang menawarkan rangsangan sensual untuk menarik perhatian. Jika arsitektur masih dianggap sebagai sokoguru kultural bangsa Indonesia, maka yang dapat dibicarakan secara intelektual adalah suatu proses dekandensi peradaban modern di jaman modernisasi, dan bila perlu arsitektur tamadun terlepas dari pengaruh para teknokrat, birokrat dan pengusaha agar dapat berhasil guna.

Lalu apakah masih cukup legitim untuk membicarakan arsitektur di Indonesia tanpa dikaitkan dengan yang telah dikerjakan oleh gerakan *Modern* atau *Postmodern architecture* di Kontinental Eropa Barat (karena pola hidup kita sempat dipengaruhi oleh kekuatan budaya Eropa Barat). Mungkin, lebih bijak untuk

tidak tenggelam pada formalisasi istilah arsitektur yang terpaku pada masalah gaya. Arsitektur di Indonesia dirasakan perlu untuk lebih memantapkan dasar-dasar teoritik keberadaannya, agar tidak kehilangan orientasi dalam perkembangan selanjutnya. Dasar-dasar teoritik ini digali dari sumber-sumber tradisional dan kolonial yang mampu menerjemahkan dunia pembangunan masyarakat industri setiap saat. Jika *Post-modern architecture* merupakan suatu gejala budaya, maka keberadaannya perlu dilihat dalam realitas sosial masyarakat paskaindustrial.

Semua realitas sosial tentang *postmodern architecture* di Indonesia bergantung seluruhnya kepada birokrasi yang menjalankan kepemimpinan bernegara di Indonesia, dalam pandangannya untuk menguraikan keinginan dari post-modern itu sebenarnya. Sebab postmodern menurut Orde Baru memiliki makna yang berbeda dengan postmodern pasca 21 Mei 1998, apalagi sekarang kita memiliki pemerintahan yang betul-betul mulai melihat keberagaman di dalam persatuan itu sebenarnya diperbolehkan untuk melihat segala sesuatu yang terjadi, tidak terkecuali dunia arsitektur ada di dalamnya. Yang harus kita antisipasi adalah kesiapan mental masyarakat kita menghadapi era baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi dalam menghadapi era baru arsitektur Indonesia.

IV. KONSEP PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENGAN LANDASAN TEORI ARSITEKTUR TAMADUN

Kota bisa ada karena image dari penduduknya, ada rasa "*sense of belonging*" yang melekat pada masing-masing individu masyarakatnya. Kepedulian pada tempat tinggalnya lah yang membuat mereka merasa bahwa disinilah ia berperikehidupan. Disadari atau tidak, menurut Jean-Paul Sarte, pada prinsipnya manusia selaku individu suka akan kebebasan, dan bergerak berdasarkan siklus kehidupan dari kodrat yang dimiliki menuju pada pemenuhan keinginan/ kebutuhan dan melakukan sesuatu untuk memenuhinya, yaitu dengan bertindak dengan cara masing-masing secara bebas, yang pada akhirnya mereka membutuhkan orang lain untuk dapat diakui keberadaannya (eksistensi).

Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia akan mulai menemukan eksistensinya pada suatu komunitas yang berisikan lebih banyak orang, tidak mungkin kesendirian manusia dapat menemukan suatu pengakuan,

dan untuk itu kebutuhan akan komunitas yang paling menghargai adanya pluralisme adalah komunitas perkotaan. Manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan penduduk kota akan selalu berbuat sesuatu yang terbaik guna memenuhi kepentingannya, mulai dari urusan pribadi hingga pada skala yang lebih besar.

Sejak hembusan Reformasi ditiupkan, pola pikir postmodern yang memiliki keunggulan yang pluralisme, perlahan tapi pasti mulai menjadikan golongan manusia-manusia lain dalam komunitas perkotaan yang tidak “berkuasa”, mampu pula bereksistensi sesuai dengan subyektivitasnya sendiri-sendiri. Masyarakat menengah kebawah yang sering di abaikan, kini bangkit menyuarakan hak-haknya, dan ini berjangkit pada semua aspek kehidupan kota yang sangat beragam. Ada pluralisme inilah, yang kemudian menjadikan masing-masing penduduk kota bahkan kehidupan kota serta lebih khusus lagi terhadap fisik kota saling berlomba-lomba untuk membuktikan “eksistensinya” dengan kemampuan yang terbaik yang ia miliki. Persaingan antar kampung, etnis, antar suku sampai persaingan antar pejabat dan sebagainya, membuktikan betapa individu-individu dari masing-masing komunitas yang ada dalam kehidupan kota, saling merebut suatu “eksistensi” yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kesemuanya itu bagian dari hal yang kreatif, yang harus berputar dan selalu menghasilkan hal-hal yang baru dan orisinal. Persaingan untuk menjadi yang terbaik bukan berarti saling bertentangan, karena eksistensi muncul bukan untuk saling bertentangan namun saling mendukung meskipun harus bersaing dengan kondisi-kondisi yang terjadi.

Dalam perjalanannya ber-eksistensi, manusia yang hidup dalam komunitas perkotaan, memerlukan wahana atau media komunikasi. Tidaklah berarti suatu upaya manusia, jika manusia lain tidak paham tentang apa yang menjadi tujuan dari keberadaan upayanya itu. Komunikasi dimulai, ketika manusia-manusia saling membutuhkan. Hal ini memaksa manusia menciptakan “sesuatu” yang bisa dijadikan wadah menuju satu pemahaman (bahasa, telepon, TV, dll). Selain itu, fisik atau badan manusia merupakan sarana komunikasi yang baik, dengan fisiknya manusia bisa menginformasikan kesan yang ingin ditanggapi orang lain, agar sesuai dengan keinginannya. Isyarat pun diterima dengan persepsi yang subyektif, yang pada akhirnya masuk dalam pikiran manusia guna menginterpretasikan “bahasa” yang dihasilkan. Image pun timbul, saat inilah terjadi konflik

antara kebenaran dan kebohongan (realita vs sebuah mimpi).

Mental/ moral “Asal Bapak Senang” dalam rezim Soeharto, begitu mewabah dan hidup subur pada proses, pemerintahan dan birokrasi, baik di desa maupun di kota. Hal ini menyebabkan segala sesuatu menjadi ambigu dan tak terkontrol, manusia cenderung lupa diri dan larut dalam nafsu kebebasannya tetapi sebenarnya kebebasan yang didapat ternyata meracuni seluruh sendi-sendi kehidupan terutama arsitektur itu sendiri. Memang kita sadari bahwa kebebasan tersebut yang dapat mendorong manusia untuk selalu menunjukkan eksistensinya, meskipun nafsu tidak selamanya merupakan kekuatan yang mengikis hati nurani, namun manusia cenderung terjebak dalam pikiran-pikiran dunia yang bergerak tanpa batas.

Bila kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, bahwa sebenarnya masih terbuka peluang untuk meletakkan dasar arsitektur tamadun sebagai dasar untuk mengembangkan kota-kota yang sesuai dengan kehidupan masyarakat nusantara tersebut. Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa menurut Stephen P. Borgatti bahwa untuk mencapai keberhasilan di dalam membangun sebuah konsep dari sebuah teori dapat melalui beberapa langkah namun langkah yang sesuai dengan kehidupan perkotaan di Indonesia adalah dengan cara *Surprise* yaitu bagaimana sebuah teori yang baik harus menarik dan membawa cara pemahaman baru, sehingga dapat menghasilkan prediksi yang tak terduga dan menyenangkan, bukan merupakan sebuah teori yang *Generality* yaitu suatu teori atau konsep yang baik bersifat umum sehingga dapat diterapkan pada lingkup situasi atau kondisi yang lebih luas, tanpa memperhatikan kekuatan masyarakat setempat. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Sudrajat (1999) bahwa teori yang dapat menyesuaikan dengan kehidupan Arsitektur tamadun adalah *Teori Sosial Ilmiah* yang pada umumnya berupa pernyataan-pernyataan (*statements*) tentang sifat, fungsi dan pengaruh arsitektur dalam rona kemasyarakatan dan nilai sosial budaya tertentu, yang diturunkan secara sistematis dari pengamatan obyektif dan bukti-bukti empiris, dan seringkali berkaitan erat dengan teori sosial ilmiah dari disiplin keilmuan yang lain, seperti: antropologi, arkeologi, sosiologi, sastra, dan lainnya. Selain itu yang dapat menyesuaikan dengan kehidupan Arsitektur tamadun selain Teori Sosial Ilmiah yaitu Teori Normatif mempertanyakan tentang bagaimana seharusnya arsitektur berperan dalam rona

kemasyarakatan serta nilai sosial budaya tertentu, sehingga pada gilirannya akan mampu mempengaruhi kepekaan apresiasi, evaluasi dan antisipasi terhadap fenomena arsitektur di masa lampau, masa kini dan masa mendatang.

V. KESIMPULAN

Melihat seluruh penjelasan diatas, yang dapat kita ketengahkan bahwa eksistensi manusia dalam menunjukkan jati dirinya bila tidak terkendali dapat memberikan hasil yang justru dapat menjebak kita kedalam suatu hal tanpa disadari terjajah kedalam faham-faham yang sebenarnya bertentangan dengan hakikat kehidupan kita. Melihat dunia arsitektur yang sangat besar sekali kemungkinannya untuk terjajah, nyatanya hingga saat ini kita tidak sadar bahwa arsitektur negeri ini secara perlahan namun pasti sudah dijajah oleh arsitektur luar dengan bias-bias yang sangat mematkan dan kitapun merasa bangga dengan keadaan-keadaan tersebut. Bermunculannya industri-industri yang berorientasi kepada faham arsitektur luar sangat besar pengaruhnya terhadap industri karya arsitektur di Indonesia. Kita tidak pernah lagi melihat sebuah genteng dengan khas Jawa, mahkota atap ala Bali, jendela-jendela krepak ala Melayu, ornamen-ornamen kedaerahan yang sebelumnya sangat kental menjiwai sebuah karya arsitektur hingga pada sebuah suasana kehidupan kota-kota tradisional seperti di Yogyakarta, Solo, Bali dan lain sebagainya. Yang kita kenal adalah wallpaper, alkubon, tiang-tiang romawi, gypsum dan gedung-gedung yang kembarannya terdapat di kota London, New York, Singapura dan lain sebagainya. Inilah suatu bukti bahwa karya-karya arsitektur monumental yang kita temui sekarang adalah suatu bangunan-bangunan yang bercermin “Westernisasi” yang merambah sangat deras pada kehidupan kota-kota besar di Indonesia. Apakah ini yang dinamakan sebuah “eksistensi” dari masyarakat kota?.

Seorang pengusaha yang sangat dekat dengan garis birokrasi pemerintahan, dengan bangganya membawa sebuah konsep perumahan ala “Cowboy” nya Paman Sam untuk dibuat pada suatu lokasi yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat dari leluhurnya. Di dasarkan kekuatan pengaruhnya serta didukung lingkaran pemerintah yang cukup kuat hal tersebut diatas tidak terlalu sulit untuk merealisasikan dan bahkan menjadikan sebuah megaprojek yang didukung oleh seluruh komponen. Ironisnya lagi masyarakat kita yang tadinya memiliki “eksistensi” yang cukup kuat pada regionalnya, menjadi ikut-ikutan bergaya seperti pengusaha

tersebut dengan cara berlomba-lomba untuk membeli perumahan tersebut. Disadari atau tidak, bahwa masyarakat yang masuk dalam komunitas tersebut menjadikan jati dirinya berubah seratus delapan puluh derajat.

Cerita di atas adalah salah satu contoh yang berjangkai pada kehidupan kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Pertanyaannya siapa yang perlu di persalahkan, masyarakat, pengusaha, pemerintah atau kesemuanya yang bersalah pada negeri ini. Ketika realita dan kepalsuan yang penuh dengan mimpi-mimpi saling berbenturan, maka pihak-pihak yang terlibat pun akan saling “bermain”. Pada masa sekarang perlu dipertanyakan, mana yang memilih kebenaran (realita) dan mana yang memilih kebohongan (mimpi). Tentu dalam proses kehidupan kota, menjadi pengusaha, merupakan suatu posisi yang sangat sulit, bagai makan buah simalakama. Sangat tipis beda antara seorang pengusaha yang benar-benar mengabdikan pada kepentingan rakyatnya dengan seorang yang hanya memainkan sebuah peran parody. Pengusaha kadang kala berpikir dan berencana pada level, yang sebenarnya bukan pada bidang atau lingkup yang dikuasainya. Alias keluar dari konteks yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya. Sehingga cenderung suatu hasil rencana atau rancangan kota yang merupakan wujud eksistensinya pada dirinya secara pribadi maupun pada masyarakat perkotaan secara umum, hanya merupakan suatu proyek yang penuh dengan realitas semu ketimbang realita yang ada dilapangan. Masyarakat hanya menjadi kelinci percobaan dan selalu dalam posisi yang kalah. Disinilah ketidak-adilan muncul sebagai akibat dari eksistensi yang terbias.

Kita tidak menutup diri secara rapat-rapat dengan terbukanya negeri ini menerima faham-faham arsitektur luar, tetapi kita juga jangan menjadi masyarakat arsitektur yang picisan sehingga kita tidak dapat melihat potensi-potensi arsitektur yang kita miliki. Bila kita lihat faham industrialisasi yang berkembang saat ini sebenarnya harus kita pandang sebagai sesuatu yang dapat memperkaya kehidupan arsitektur Indonesia, bukan sebaliknya industri arsitektur yang berorientasi faham arsitektur luar menjadi kiblat yang kita dewa-dewakan untuk mengisi kehidupan arsitektur Indonesia. Jika hal ini terjadi maka menangislah *postindustrialisme* dalam melihat hal ini semua, karena hal tersebut bertentangan dengan makna dari misi yang dibawa oleh faham *postindustrialisme* tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa sebenarnya dalam *postindustrialisme*, keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, mutu, simbol, makna, estetika

dan lain sebagainya yang mempengaruhi industri rancang bangun sangat di benarkan dan di dukung secara total. Kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban tersendiri juga dapat membentuk suatu industri yang lebih berorientasi regional dengan membuat keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, mutu, simbol, makna, estetika dan lain sebagainya yang lebih berjiwa Indonesia.

Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sendiri untuk memberikan dan mengisi wacana arsitektur Indonesia berdasarkan keinginan yang bebas, dengan kata lain eksistensinya diakui oleh bangsanya tanpa dipengaruhi standar-standar yang dapat menjebak kedalam suatu keadaan yang menyebabkan Arsitektur tamadun menjadi “mati suri” bahkan menuju ambang “kematian”. Sebab bila kita terjebak maka kita kan dijajah yang kedua kalinya khususnya melalui sepak terjang industri kapitalis yang membonceng isu “Globalisasi”, melalui kerjasama-kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pemimpin kita. Para pemimpin kita pada masa Orde Baru tanpa sadar dan tanpa pikir panjang bahkan dengan bangganya turut menandatangani kesepakatan Pasar Bebas Asean, AFTA bahkan Dunia. Dalam hal ini, memang tidak ada satu laranganpun untuk ber-pasar bebas, tetapi kita harus mempersiapkan diri, mem-proték diri sehingga keinginan-keinginan “licik” yang tersembunyi dibalik “pasar bebas” tersebut tidak akan sampai mengatur kehidupan kita sebagai negara yang berdaulat. Inilah suatu wujud bahwa pemimpin kita pada waktu itu selalu mendemonstrasikan status mereka sebagai seorang pemimpin yang memproklamkan dirinya sebagai pemimpin yang dapat membawa masyarakat ke alam kemakmuran, sehingga tanpa disadarinya, bahwa kita sudah pernah dikoloni oleh bangsa asing, dan secara psikologis dan tidak sadar pula pemimpin kita telah memasukkan diri mereka bahkan membawa masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk dikoloni lagi (penjajahan jilid ke 2), walaupun kolonialisasi pada waktu dulu berbeda dengan sekarang.

Apakah kita di dalam melihat ini akan berdiam diri saja, apakah kita masih menginginkan menjadi tamu di negara sendiri. Jawabannya kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita bisa membuat standar sendiri, peraturan sendiri, estetika sendiri, arsitektur sendiri, rancang bangun sendiri yang didasari oleh teknologi terapan hasil karya kita sendiri dan lain sebagainya, bila perlu orang lain atau negara lain yang mengikuti standar-standar yang telah kita tentukan. Sebaiknya kita sadar

dan belajar dari sejarah lembaran hitam negara kita atautkah kita mengulangi lagi cerita wayang yang sangat terkenal ciptaan jenius rakyat: *Petruk jadi Raja*, atau *Kere Mungah Bale*. Selama kita tidak sadar akan jati diri kita sebagai bangsa yang besar yaitu Indonesia maka selama itu kita juga akan dijajah oleh kapitalisme walaupun wujud penjajahan dahulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Kalau kita tidak mengenal jati diri kita, mana mungkin kita dapat mengenal arsitektur tamadun, artinya bahwa kita akan menjadi tamu di negara kita sendiri.

Memang sampai sekarang apa yang dimaksud dengan arsitektur tamadun, masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Kita semua masih mempunyai tugas besar yang sangat membutuhkan pikiran yang mendalam yaitu dalam memecahkan misteri sekaligus menjawab pertanyaan: “Arsitektur tamadun, yang manakah itu?”, namun kalau sebenarnya bila kita hanya berorientasi mencari jati dirinya saja. Arsitektur tamadun adalah arsitektur yang harus memenuhi kebutuhan manusia Indonesia dan inilah yang disebut dengan ciri khas Indonesia. Yang harus dijaga adalah cara hidup kita, tradisi bangsa Indonesia, dimana di dalam merancang suatu bangunan harus disesuaikan dengan kebiasaan kita. Artinya, selama bangunan tersebut sesuai dengan cara hidup kita, dan kita nyaman untuk melakukan kegiatan di dalamnya, itulah sebagian dari makna arsitektur tamadun. Tetapi yang diharapkan dalam hal ini, walaupun kita masih berada di dalam polemik berkepanjangan tentang “Arsitektur tamadun”, marilah kita secara bahu membahu untuk tidak mengotori norma-norma “Arsitektur tamadun” tersebut dengan hal-hal yang justru dapat menjauhkan diri kita dari “Arsitektur tamadun” tersebut. Biarkan arsitektur tamadun berjalan sebagai mana mestinya, dan tugas kita pula untuk mengisi wacana yang dikandung dari pengertian arsitektur Nusantara, dan semoga kita suatu saat dapat menyimpulkan dan mencari rumusan-rumusan tentang arsitektur tamadun, waktulah yang akan membuktikannya.

Selama kita tidak mengenal karakter arsitektur tamadun, maka selama itu pula kita dapat dipengaruhi dan didominasi oleh model-model rancang bangun dari industri-industri kapitalis dalam mengisi kasanah arsitektur tamadun, dan selama itu pula Arsitektur tamadun mengalami suatu tragedi yaitu suatu “Arsitektur tamadun yang hanya menjual mimpi-mimpi gombal”. Padahal kekayaan nilai-nilai arsitektur tamadun cukup banyak dan tersedia di bumi Nusantara, menyebar mulai dari Sabang hingga Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

1. Halim, A., & Abdullah, S., 2006, *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan*,2(1),53–64.<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
2. Hunggurami, E., 2017, *Evaluasi Dan Pengembangan Kapasitas Terminal Bus Kota Kupang*. VI(2), 129–142.
3. Kaur, K. 2016, *A Study of Vehicular Information Network Architecture based Named Data Networking (NDN)*. 140(6), 34–39.
4. Laurens, J. M., 2004, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, penerbit PT Grasindo.
5. Lestari, K., & Alamsyah, B., 2019, *enhancement technology aesthetics*. 10 (01), 47–53.
6. Menteri, desa, pembangunan daerah tertinggal, d. T., & republik indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa*. 1–10. <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-desa.pdf>
7. Nurillah, A. S., 2014, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKPD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 3, 1–13. <https://doi.org/2337-3806>
8. Suryaputra P., A., Samopa, F., & Hindayanto, B. C., 2014, *Klasterisasi Dan Analisis Trafik Internet Menggunakan Fuzzy C Mean Dengan Ekstraksi Fitur Data*. *Jurnal Informatika*, 12(1), 33–39. <https://doi.org/10.9744/informatika.12.1.33-39>
9. Taufik, T., 2013, *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus,1–61. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31387&val=2268>